

BAB V

REFLEKSI TEOLOGIS

5.1. Kesadaran Misi Gereja yang Holistik

GMIT merupakan salah satu lembaga keagamaan yang melaksanakan pelayanannya melalui gereja untuk menanamkan nilai-nilai spiritual guna membentuk masyarakat yang berakhlak dan beretika, sehingga tercipta tatanan sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera, terutama di wilayah Pulau Timor, Alor, Rote, Flores, Sabu, serta umat manusia secara luas. Oleh karena itu, GMIT mengemban misi pelayanan yang dikenal dengan sebutan "Panca Pelayanan GMIT". Kurangnya pemahaman tentang hal ini dapat mengurangi esensi dari pelayanan GMIT. Panca Pelayanan GMIT terdiri atas: *pertama*, Diakonia. *Kedua*, Koinonia. *Ketiga*, Marturia. *Keempat*, Liturgia dan *Kelima*, Oikonomia.¹

a. Diakonia (Pelayanan)

Kata "*diakonia*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelayanan. Terdapat tiga istilah terkait: *Diakonos* (pelayan), *Diakoneo* (melayani) dan *Diakonia* (pelayanan). Dalam Kisah Para Rasul 19:22, Kolose 4:7, dan Efesus 6:21, disebutkan bahwa beberapa orang memberikan *diakonia* kepada Paulus, artinya mereka membantu pelayanannya. Diakonia menjadi ciri khas gereja dan merupakan tanda keberadaannya. Meskipun demikian, diakonia juga merupakan karunia khusus setara dengan nubuat dan pengelolaan gereja namun berbeda dari sekadar pemberian yang didasari

¹ *Buku Tata Gereja GMIT* (Kupang: Sinode GMIT, 2018), 12–15.

kemurahan hati.² GMIT menetapkan diakonia sebagai bagian integral dari pelayanannya di dunia, bahkan sebagai identitas gereja. Gereja hadir untuk melayani dunia, sebagaimana Kristus sendiri menyatakan diri-Nya sebagai pelayan (Matius 20:28), bahkan rela menyerahkan nyawa-Nya bagi banyak orang. Nilai pelayanan dalam diakonia terletak pada pengorbanan. Oleh karena itu, GMIT melalui gereja harus siap berkorban dalam menjalankan tugas diakonia ini.³

Pada hakikatnya, pelayanan gerejawi senantiasa berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan jemaat. Bentuk pelayanan ini terwujud dalam tiga model pendekatan: *Pertama*, diakonia transformatif yang fokus pada pengembangan kapasitas manusia secara berkelanjutan. *Kedua*, diakonia reformatif berupa penyediaan modal usaha untuk menciptakan kemandirian ekonomi. *Ketiga*, diakonia karikatif yang bersifat bantuan langsung berupa materi untuk memenuhi kebutuhan mendesak.⁴ Dalam praktik pastoral, model ketiga (karikatif) justru paling sering diimplementasikan oleh GMIT Gunung Hermon O'Baki adalah diakonia karikatif.

Oleh karena itu perlunya adanya perubahan yang perlu di lakukan oleh gereja untuk lebih menerapkan diakonia reformatif sebab Gereja sebagai institusi yang tidak hanya berperan dalam kehidupan rohani, tetapi

² Mery Kolimon, *Teologi Pelayanan GMIT dalam Konteks Masyarakat NTT* (Kupang: Artha Wacana Press, 2020), 50-55.

³ William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari: Matius* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 320-322.

⁴ Departemen Diakonia GMIT, *Panduan Pelayanan Diakonia* (Kupang: Sinode GMIT, 2019), 12-15.

juga dalam kehidupan sosial, perlu terus melakukan pembaruan, khususnya dalam pelayanan diakonia. Diakonia reformatif merupakan pendekatan yang menekankan pada transformasi holistik, di mana pelayanan gereja tidak hanya sekadar memberikan bantuan materiil, tetapi juga memberdayakan individu dan masyarakat secara menyeluruh baik secara spiritual, ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga agen perubahan yang membawa pembebasan, keadilan, dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan semangat Reformasi yang menekankan pembaruan terus-menerus (*ecclesia reformata semper reformanda*) dan relevansi iman dalam menjawab tantangan zaman.⁵

Penerapan diakonia reformatif menuntut gereja untuk lebih peka terhadap kebutuhan nyata masyarakat, termasuk ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan marginalisasi kelompok rentan. Misalnya, gereja dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, atau advokasi kebijakan yang berpihak pada kaum lemah. Selain itu, gereja juga perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, LSM, dan akademisi, untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Dengan demikian, diakonia tidak lagi bersifat karitatif (sekadar memberi), melainkan transformatif (mengubah kondisi).⁶

⁵ Nico A. Botha, *Diakonia in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment* (Zurich: LIT Verlag, 2012), 45–60.

⁶ bdk. Duncan B. Forrester, *Theological Fragments: Explorations in Unsystematic Theology* (London: T&T Clark, 2005), 112–115.

Perubahan ini tentu memerlukan komitmen kuat dari jemaat dan para pemimpin gereja untuk keluar dari zona nyaman dan menjadikan pelayanan sebagai wujud nyata kasih Kristus yang membebaskan. Dengan menerapkan diakonia reformatif, gereja tidak hanya menjalankan misinya secara lebih relevan, tetapi juga menjadi tanda Kerajaan Allah yang membawa pengharapan dan pemulihan bagi dunia yang terluka.⁷

Dari uraian di atas maka, Intisari dari pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa diakonia pada hakikatnya merupakan wujud pelayanan kasih yang bersumber dari anugerah Allah, bertujuan untuk mentransformasi dan memajukan kesejahteraan jemaat maupun masyarakat luas. Ruang lingkup pelayanan ini mencakup pendampingan terhadap berbagai kelompok rentan, termasuk janda, duda, anak yatim piatu, orang sakit, kaum miskin, mereka yang tertindas, serta masyarakat terpinggirkan. Melalui pelaksanaan diakonia ini, GMIT mewujudkan panggilannya sebagai representasi nyata dari Kerajaan Allah di dunia.

b. Koinonia (Persekutuan).

Konsep *koinonia* yang berasal dari bahasa Yunani secara mendasar mengandung makna persekutuan. Istilah ini berakar dari kata "*koin*" yang umum diterjemahkan sebagai "bersama" atau "berbagi". Secara esensial, *koinonia* menekankan pada partisipasi bersama dalam suatu hal, di mana makna aslinya lebih menonjolkan aspek "menerima bagian" daripada "memberi bagian". Namun dalam perkembangan pemakaiannya,

⁷ Cynthia D. Moe-Lobeda, *Resisting Structural Evil: Love as Ecological-Economic Vocation* (Minneapolis: Fortress Press, 2013), 78–82.

istilah ini kemudian mencakup pula makna kedermawanan, sebagaimana tercermin dari penggunaan awalnya yang mengandung arti "bersama-sama memiliki" atau "persekutuan" (Ensiklopedi Alkitab Masa Kini). Dengan demikian, *koinonia* mengintegrasikan tiga dimensi makna yang saling terkait: (1) menerima bagian; (2) memberikan bagian; dan (3) berpartisipasi bersama. Dimensi pertama tentang "menerima bagian" dapat ditemukan dalam I Korintus 9:23 ("Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya") dan Roma 11:17. Sementara makna kedua tentang "memberi bagian" terdapat dalam II Korintus.⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa, pelayanan GMIT yang pertama yakni pelayanan Koinonia merupakan pelayanan membangun persekutuan yang mencerminkan hubungan antara satu gereja dengan anggota gereja yang lain. Dalam pelayanan tersebut masing-masing anggota gereja "mendapat bagian" sebagai hak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan sebagai kepala gereja; masing-masing anggota gereja juga "memberi sesuatu" dalam perbuatan praktis bagi sesama; masing-masing anggota gereja secara bersama-sama mendapat bagian dalam persekutuan. Pengertian yang ketiga merupakan dampak dari pengertian yang pertama dan kedua. Pada tingkat praktis persekutuan jemaat harus diawali dengan kehendak baik individu-individu untuk mengambil bagian dalam persekutuan karena ini berkaitan berkaitan dengan hak, kemudian memberi bagian yang berhubung dengan kewajiban bermurah hati pada orang lain.

⁸ *First Corinthians*, 435.

Pada akhirnya akan menciptakan persekutuan secara bersama sebagai jemaat.⁹

Persekutuan (Koinonia) ini bukan sekadar aktivitas internal gereja, melainkan landasan untuk menjalankan Amanat Agung. Sebagaimana Matius 28:19-20 menegaskan, pengajaran tentang perintah Kristus harus berujung pada keterlibatan nyata sesuai semangat Koinonia yang aktif 'memberi bagian' kepada dunia. Amanat Agung tidak hanya berfokus pada pembaptisan sebagai aspek spiritual, tetapi juga menekankan pengajaran untuk melaksanakan seluruh perintah Kristus, yang mencakup dimensi praksis seperti keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum marginal. Dengan demikian, gereja dipanggil tidak hanya untuk membina iman secara internal, tetapi juga terlibat aktif dalam transformasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan perumpamaan "garam dan terang dunia" (Matius 5:13-16), di mana gereja harus "memberi rasa" melalui keterlibatan nyata dalam isu-isu sosial dan "menerangi" melalui kesaksian hidup yang berdampak. Artinya, gereja tidak cukup hanya berkhotbah tentang kasih dan keadilan, melainkan harus mewujudkannya dalam tindakan konkret seperti memperjuangkan pendidikan bagi anak putus sekolah, mendampingi kaum tertindas, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Tanpa peran aktif ini,

⁹ Benyamin Fleming Intan, "Pelayanan Diakonia di GMIT: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Teologi* 10, no. 2 (2021): 45-60.

gereja berisiko kehilangan relevansinya sebagai agen Kerajaan Allah di dunia.¹⁰

5.2. Tantangan dan Peluang Gereja dalam Menangani Isu Pendidikan

Gereja menghadapi tantangan mendasar dalam menjalankan perannya di bidang pendidikan, terutama terkait pemahaman teologis dan keterbatasan sumber daya. *Pertama*, mentalitas yang memisahkan urusan "sakral" (ibadah) dan "sekuler" (pendidikan) mencerminkan dikotomi palsu yang bertentangan dengan teologi integral. Pandangan ini mengabaikan fakta bahwa Alkitab menyerukan keterlibatan umat Allah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum lemah. *Kedua*, ketergantungan gereja pada dana kolekte yang umumnya sudah terkuras untuk kebutuhan operasional menyulitkan respons terhadap masalah struktural seperti tunggakan uang sekolah.¹¹

Namun, di balik tantangan tersebut, terbuka peluang besar jika gereja mau memanfaatkan jaringan dan modal sosialnya. Jaringan sinode GMIT, misalnya, bisa menjadi wadah untuk gerakan kolektif baik dalam penggalangan dana maupun program pendidikan alternatif sehingga beban tidak hanya ditanggung satu jemaat. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap gereja memberikan akses unik untuk advokasi kebijakan, misalnya dengan menjadi mediator antara keluarga miskin dan pemerintah

¹⁰ France, R.T. *The Gospel of Matthew*. Eerdmans, 2007, hlm. 1112-15. Bandingkan dengan Wright, Christopher J.H. *The Mission of God's People*. Zondervan, 2010, hlm. 89-93; dan Stott, John. *The Message of the Sermon on the Mount*. IVP, 1985, hlm. 67-72.

¹¹ Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism*. Eerdmans, 1931, hlm. 30-35. Bandingkan dengan Wolterstorff, Nicholas. *Until Justice and Peace Embrace*. Eerdmans, 1983, hlm. 45-52; dan World Council of Churches. *Financial Sustainability of Churches in Developing Countries*. 2021, hlm. 12-15.

dalam mengakses program BOS atau beasiswa. Contoh nyata dari Gereja ECCP di Filipina menunjukkan bagaimana kemitraan dengan LSM (seperti *Philippine Educational Theater Association*) mampu menciptakan solusi pendidikan kreatif bagi anak miskin. Ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci mengatasi keterbatasan sumber daya.¹²

Kesimpulan kritis: Tantangan gereja dalam isu pendidikan bukanlah hal teknis semata, melainkan ujian iman apakah gereja berani keluar dari zona nyaman "ibadah rutin" dan mengaktualisasikan panggilannya sebagai agen transformasi. Peluang ada, tetapi harus dijawab dengan strategi yang berani, teologi yang menyeluruh, dan kemauan untuk bermitra. Tanpa itu, gereja hanya akan menjadi penonton dalam krisis pendidikan yang semakin kompleks.

5.3. Panca Pelayanan dalam Menangani Isu Putus Sekolah

Dalam konteks pelayanan diakonia, pendampingan anak putus sekolah membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup dua aspek kritis: akademik dan psikososial. Fokus pada pendampingan oleh mentor sebaya yang lebih berpengalaman jemaat yang berpendidikan tidak hanya membantu anak mengejar ketertinggalan pelajaran, tetapi juga membangun relasi yang egaliter dan memulihkan harga diri mereka. Sementara itu, pendampingan psikososial khususnya bagi anak yang mengalami trauma akibat perundungan

¹² Kolimon, Mery. *Jaringan Pelayanan GMIT: Studi Kasus Sinodalitas di NTT*. GMIT Press, 2020, hlm. 78-82. *Faith-Based Organizations in Education*. World Bank, 2019, hlm. 23-25. Bautista, Melissa Mae C. "The Church as Educational Advocate: The ECCP-PETA Partnership Model." *Journal of Asian Christian Education*, vol. 15, no. 2, 2022, hlm. 45-60.

atau kemiskinan menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan. Namun, implementasi ini terbentur pada minimnya relawan terlatih di jemaat, yang sering kali hanya memiliki sumber daya manusia dengan pemahaman terbatas tentang teknik konseling dasar. Solusi seperti pelatihan konseling bagi majelis bisa menjadi langkah awal, tetapi perlu diperkuat dengan jejaring profesional (bekerja sama dengan psikolog atau pekerja sosial) untuk kasus-kasus yang kompleks. Tantangan ini menegaskan bahwa diakonia pendidikan bukan sekadar aktivitas karitatif, melainkan pelayanan transformatif yang membutuhkan kesiapan sumber daya dan komitmen jangka panjang.¹³

Di sisi lain, aktualisasi oikonomia melalui kolaborasi pendanaan menawarkan peluang strategis untuk mengatasi keterbatasan finansial gereja. Advokasi kepada pemerintah misalnya memastikan anak miskin terdaftar dalam program BOS atau PIP adalah bentuk pelayanan yang mengubah sistem ketidakadilan, bukan hanya mengobati gejalanya. Kemitraan dengan LSM seperti *Save the Children* juga dapat membuka akses pada program pendidikan inklusif, sebagaimana dicontohkan oleh Gereja Katolik di Flores yang bersama *Caritas* mendirikan rumah belajar bagi anak putus sekolah. Namun, kolaborasi semacam ini harus diawali dengan pemetaan kebutuhan lokal yang cermat: apakah hambatan utama anak-anak adalah biaya sekolah, jarak ke sekolah, atau motivasi belajar? Tanpa analisis konteks yang mendalam, program berisiko menjadi solusi yang tidak tepat sasaran. Contoh

¹³ Bonhoeffer, Dietrich. *Life Together*. Harper & Row, 1954, hlm. 67-72. Vygotsky, L.S. *Mind in Society*. Harvard University Press, 1978, hlm. 84-91. Swinton, John, dan Harriet Mowat. *Practical Theology and Qualitative Research*. SCM Press, 2006, hlm. 112-118.

gereja di Flores menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada kemampuan gereja memahami realitas masyarakat dan membangun kemitraan yang saling mengisi, bukan sekadar mencari pendanaan.¹⁴

Kesimpulan: Aktualisasi Panca Pelayanan khususnya diakonia dan oikonomia dalam isu putus sekolah menuntut gereja untuk bergerak melampaui pola pikir amal tradisional. Diakonia harus dikembangkan sebagai pendampingan yang memberdayakan, sementara oikonomia perlu dilihat sebagai strategi untuk mengubah struktur ketidakadilan melalui kemitraan multidimensi. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi agen pembaharuan yang mengakar pada kebutuhan nyata masyarakat.

¹⁴ Guder, Darrell L. *Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America*. Eerdmans, 1998, hlm. 145-150. *Faith-Based Organizations and Education Development*. World Bank, 2022, hlm. 33-37. Caritas Indonesia. *Program Pendampingan Anak Putus Sekolah di NTT*. 2023, hlm. 12-15. Kretzmann, John P., dan John L. McKnight. *Building Communities from the Inside Out*. ACTA Publications, 1993, hlm. 78-82.